

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menguji konsistensi dan mengidentifikasi apakah kekayaan daerah, umur daerah, jumlah legislatif, indeks pembangunan manusia, dan jumlah organisasi perangkat daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis statistik yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa umur daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa jumlah legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa jumlah organisasi perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Hasil pengujian menjelaskan sebagian tidak mendukung tujuan penelitian. Variabel Kekayaan Daerah, bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permadi (2017), Syafitri (2012), Rahmayanti (2018), dan Setyowati (2016). Variabel Umur Daerah, sejalan dengan penelitian Permadi (2017), Rahmayanti (2018), Girsang dan Yuyyeta (2015) yang mana tidak mempengaruhi pengungkapan LKPD. Variabel Jumlah Legislatif sejalan dengan penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012). Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah OPD sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2016) yang hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti tidak bisa mendapatkan laporan keuangan daerah tahun terbaru yaitu tahun 2018 untuk dijadikan sampel penelitian karena terlalu lamanya data LKPD diaudit oleh BPK RI dan dapat dipublikasi pada bulan September, sehingga peneliti hanya dapat melakukan penelitian dengan sampel sampai tahun 2017 saja, yang mana sebelumnya peneliti ingin menguji sampai dengan tahun 2018.
2. Perhitungan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dihitung dengan melakukan checklist yang berdasarkan pertimbangan subyektif atau opini dari peneliti. Hal ini memungkinkan akan diperoleh hasil yang berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain untuk sampel dan periode pelaporan LKPD Provinsi yang sama.

3. Peneliti hanya berfokus pada *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib), sementara jenis pengungkapan LKPD ada dua, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela)

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data LKPD dalam pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari praktik pengungkapan LKPD di Indonesia.
2. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teknik perhitungan kepatuhan pengungkapan lain yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif, bukan berdasarkan pada penilaian subyektif seperti pada teknik checklist.
3. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada *mandatory disclosure* saja, tetapi juga berfokus pada *voluntary disclosure*..

DAFTAR PUSTAKA

- Donaldson, L., dan Davis, J. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return*. Australian Journey of Management. Vol 16
- Evans, Thomas G. (2003). *Accounting Theory. Contemporary Accounting issue USA: South Western*
- Ghozali dan Chariri, (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi 5). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Girsang, H., dan Yuyetta E. (2015). *Analisa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 5). Yogyakarta: BPFE
- Indonesia Human Development Report. (1995). *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS- Statistic Indonesia.
- Laswad, F, R. Fisher, and P. Oyelere. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy 24
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- _____, (2007). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Andi

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 132 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Permadi (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmayanti D (2018). *Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Republik Indonesia, Pasal 4, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

_____, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

_____, Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

_____, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

_____, Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

- Setyaningrum, D., dan Syafitri, F. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 No. 2. Jakarta.
- Setyowati, L. (2016). *Determinan yang Memengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.6 No.1, Jakarta.
- Siahaan, MARIHOT P., (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simbolon, A. (2010). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Edisi Revisi 2010. Yogyakarta, UGM
- Soemarso, (2003). *"Akuntansi Suatu Pengantar II"*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Suwardjono. (2008). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, edisi ketiga cetakan kedelapan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

DAFTAR REFERENSI

www.bandarlampung.bpk.go.id

www.bpk.go.id

www.bps.go.id

www.lampungtimur.kab.go.id

www.tanggamus.kab.id

www.pesisirbaratkab.go.id

www.lampungbaratkab.go.id

www.tulangbawangkab.go.id

www.tulangbawangbaratkab.go.id

www.pesawarankab.go.id

www.lampungtengahkab.go.id

www.mesujikab.go.id

www.lampungselatankab.go.id

www.waykanankab.go.id

www.lampungutarakab.go.id

www.metrokota.go.id

www.bandarlampung.go.id

www.pringsewukab.go.id



Lampiran

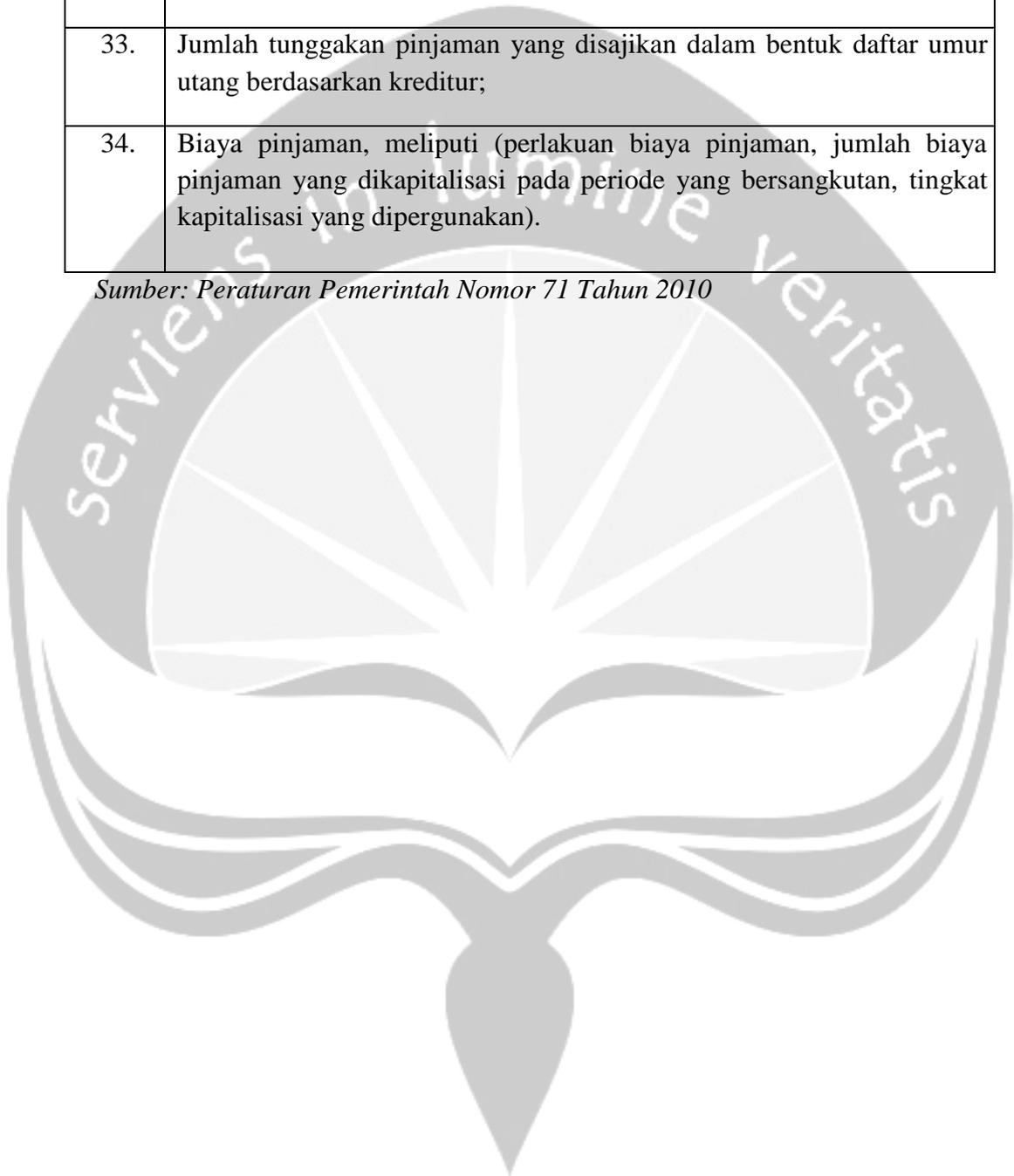
Item Pengungkapan Wajib LKPD berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP
PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan	
1.	Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2.	Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3.	Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang;
PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi	
4.	Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
5.	Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
6.	Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
7.	Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
8.	Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
9.	Perubahan pos investasi;
PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap	
10.	Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>);
11.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perolehan nilai jika ada, mutasi aset tetap lainnya);
12.	Informasi penyusutan, meliputi (nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat atau tarif penyusutan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode);
13.	Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP

14.	Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
15.	Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
16.	Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
	Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
17.	Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
18.	Tanggal efektif penilaian kembali;
19.	Jika ada, nama penilai independen;
20.	Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	
21.	Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
22.	Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
23.	Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
24.	Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
25.	Uang muka kerja yang diberikan;
26.	Retensi;
PSAP Nomor 9 tentang Akuntansi Kewajiban	
27.	Daftar skedul utang;
28.	Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
29.	Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
30.	Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
31.	Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
No	Item Pengungkapan Wajib berdasarkan SAP

32.	Perjanjian restrukturisasi utang, meliputi (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan);
33.	Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
34.	Biaya pinjaman, meliputi (perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan).

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010



Lampiran Olah Data menggunakan SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif (tanpa log)

Tabel 4.2

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengungkapan	45	46	78	64.70	7.087
kekayaan daerah	45	11.597.895	612.809.68	100.996.4	123.031.000.0
umur daerah	45	6.00	337.00	52.9333	81.06770
jumlah legislaif	45	25.00	50.00	40.0667	8.21971
ipm	45	59.79	75.98	66.5849	4.14745
jumlah opd	45	37.00	66.00	48.9778	8.09458
Valid N (listwise)	45				

2. Uji Statistik Deskriptif (dengan log)

Tabel 4.3

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y pengungkapan	45	.46	.78	.6468	.07095
x1 kekayaan daerah	45	10.06	11.79	10.8064	.39702
x2 umur daerah	45	.78	2.53	1.4468	.45316
x3 jumlah legisaltif	45	1.40	1.70	1.5925	.09880
x4 IPM	45	1.78	1.88	1.8226	.02640
X5 Jumlah OPD	45	1.57	1.82	1.6844	.07020
Valid N (listwise)	45				

3. Uji Normalitas

Tabel 4.4 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02758508
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.085
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.830
Asymp. Sig. (2-tailed)		.497

a. Test distribution is Normal.

4. Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedasitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.397	.676		.588	.560		
	Kekayaan	.005	.025	.026	.183	.856	.192	5.200
	Umur daerah	-.015	.022	-.096	-.695	.491	.205	4.868
	Legislatif	.134	.054	.187	2.506	.016	.696	1.436
	Ipm	.102	.044	.223	2.346	.025	.713	1.402
	Opd	1.345	.176	1.333	7.631	.000	.127	7.849

a. Dependent Variable: y

5. Uji Autokorelasi

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.921 ^a	.848	.829	.02930	1.863

a. Predictors: (Constant), x5, x3, x2, x1, x4

b. Dependent Variable: y

6. Uji Regresi berganda, Uji F

Tabel 4.8

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.397	.676		.588	.560
	kekayaan	.005	.025	.026	.183	.856
	Umur	-.015	.022	-.096	-.695	.491
	legislatif	.134	.054	.187	2.506	.016
	Ipm	.102	.044	.223	2.346	.025
	Opd	1.345	.176	1.333	7.631	.000

a. Dependent Variable: y

Tabel 4.10 Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.187	5	.037	43.679	.000 ^a
	Residual	.033	39	.001		
	Total	.221	44			

Tabel 4.6 Uji Heteroskedasitas

Odel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.039	.331		.119	.906
Kekayaan	-.005	.012	-.148	-.435	.666
Umur Daerah	.006	.011	.201	.611	.545
Legislatif	-.013	.026	-.090	-.502	.618
IPM	-.019	.021	-.167	-.917	.366
OPD	-.119	.086	-.572	-1.372	.178

